

PERAN PARTAI POLITIK

DALAM

MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK



PARTAI
POLITIK



ASPIRASI
MASYARAKAT



PROSES
KEBIJAKAN



KEBIJAKAN
PUBLIK

Dr. Carlos Maia

PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMPENGARUHI KEBIJAKAN PUBLIK

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si



Peran Partai Politik dalam Mempengaruhi Kebijakan Publik

Penulis:

Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si

Editor: Indana Zuhrotun Ni'mah, M.Pd

Desain Cover: Akbar Hidayat

Layouter: Lailatul Nur Ula

ISBN: 978-623-8067-93-0

Cetakan Pertama: Juli, 2026

Ukuran: 14,8 cm x 21 cm

Jumlah Halaman: viii + 148 halaman

Hak Cipta 2026, Pada Penulis

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2026

by Penerbit Indonesia Imaji

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT INDONESIA IMAJI

(Grup CV. Indonesia Imaji)

Jalan Sumbing Raya, Griya Rosari Indah, E6,

Mojosongo, Jebres, Surakarta (57127)

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

Website: www.indonesiaimaji.com

Kata Pengantar

Berangkat dari kegelisahan yang saya rasakan bertahun-tahun terakhir terhadap jurang antara “janji demokrasi” dan kenyataan yang kita alami sehari-hari, buku ini saya tulis untuk mengurai bagaimana partai politik sebagai institusi yang niscaya dalam demokrasi perwakilan benar-benar bekerja memengaruhi kebijakan publik. Saya ingin pembaca menemukan pegangan yang jernih untuk menilai bukan hanya apa yang dikatakan partai, melainkan bagaimana keputusan lahir, siapa yang diuntungkan, dan dengan alat analisis apa kita bisa menguji klaim-klaim kebijakan mereka.

Kerangka kerja yang saya gunakan bersifat integratif Lembaga, Aktor, Ide, dan Konteks agar kita tidak terjebak pada penjelasan satu faktor semata. Aturan main formal/informal, para pelaku dan sumber dayanya, gagasan yang membingkai masalah, serta lingkungan sosial-ekonomi dan historisnya dipandang sebagai sistem yang saling berkelindan dan membentuk hasil kebijakan. Dengan “kacamata” ini, pembaca diharapkan dapat mengikuti alur argumen dari hulu ke hilir tanpa kehilangan nuansa yang penting.

Dari sisi pendekatan, buku ini merupakan sintesis kualitatif-analitis yang bertumpu pada literatur klasik dan kontemporer tentang partai, sistem pemilu, dan analisis kebijakan; juga laporan riset, dokumen hukum, serta liputan media kredibel sebagai pengaya konteks. Pilihan ini sengaja

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Bagian 1 — Membongkar “Kotak Hitam” Partai dan Kebijakan	1
A. Mengapa Persoalan Ini Penting	1
B. Apa yang Dibedah Buku Ini.....	3
C. Konsep-Konsep Inti	4
D. Empat Lensa: Lembaga, Aktor, Ide, dan Konteks	6
E. Dari Mana Analisis Buku Ini Berasal.....	9
Bagian 2 — Evolusi Partai & Orientasi Kebijakan	10
A. Tipologi Partai dari Masa ke Masa.....	10
B. Ideologi vs Pragmatisme Kebijakan.....	13
C. Partai Kartel dan Pembiayaan Negara	15
D. Partai Berbasis Isu/Identitas.....	17
E. Profesionalisasi Partai.....	18
F. Trajektori Indonesia	19
G. Implikasi Orientasi Partai terhadap Kebijakan	20
Bagian 3 — Sistem Kepartaian & Dampaknya pada Kebijakan	22
A. Aturan Pemilu dan Arsitektur Sistem	22
B. Fragmentasi, Stabilitas Koalisi, dan Kualitas Kebijakan	24
C. Polarisasi dan <i>Policy Gridlock</i>	25
D. Ambang Parlemen & Efek Representasi	27

E. Serentak/Inkonruen Siklus Pemilu	28
F. Metrik Sistem Kepartaian.....	30
G. Implikasi Kebijakan.....	31
Bagian 4 — “Dapur” Internal Partai: Organisasi & Produksi Kebijakan	33
A. Demokrasi Internal & Akuntabilitas.....	33
B. Seleksi Kandidat & Kompetensi Kebijakan.....	35
C. Unit Kebijakan & Jejaring Pakar.....	37
D. Penyusunan Platform/Manifesto	38
E. Data, Evidence, dan Alat Analisis	39
F. Etika & Tata Kelola Partai	41
G. Inklusivitas & Representasi	42
Bagian 5 — Agenda Setting: Dari Janji Kampanye ke Prioritas Negara	44
A. Jendela Kebijakan & Entrepreneur Kebijakan.....	44
B. Framing Isu dan Opini Publik	46
C. Riset Opini, Manifesto, dan Kontrak Politik.....	47
D. Manajemen Transisi Pemerintahan.....	49
E. Kontinuitas vs Diskontinuitas.....	50
F. Perlawanan Agenda dan Veto	51
G. Studi Mini (Contoh Terarah)	52
Bagian 6 — Politik Elektoral: Uang, Media, dan Kampanye Digital	55
A. Pendanaan Politik & Insentif Kebijakan.....	55
B. Belanja Kampanye & Targeting.....	57
C. Media Tradisional dan Pembentukan Opini.....	59
D. Kampanye Digital & Micro-Targeting	60

E. Disinformasi, Keamanan Informasi, dan Literasi.....	61
F. Regulasi & Etika Kampanye.....	62
G. Dampak Strategi Elektoral pada Desain Program	63
Bagian 7 — Koalisi Kekuasaan & Negosiasi Kebijakan: Arsitektur Pengaruh	65
A. Arsitektur Koalisi dan Pembagian Portofolio: Kalkulus Antara Stabilitas dan Inklusivitas.....	65
B. Perjanjian Koalisi & Paket Kebijakan: Kontrak Politik di Atas Kertas.....	67
C. Logrolling & Side-Payments: Barter Pengaruh di Arena Legislatif.....	69
D. Politik Komite/Alat Kelengkapan Dewan (AKD): Mesin Pengendali Legislasi.....	70
E. Peran Pimpinan & Mediator Koalisi: Orkestrasi Harmoni Politik	71
F. Veto Players & Jalur Pintas Kebijakan: Aktor Kunci dan Jalan Tol Regulasi.....	72
G. Manajemen Konflik & Exit Strategy: Menjaga Keutuhan Koalisi	74
Bagian 8 — Legislasi & Anggaran: Arena Penentu	76
A. Siklus Legislasi dari A–Z: Anatomi Formal Pembentukan Undang-Undang	76
B. Dinamika Pembahasan RUU: Tawar-menawar di Balik Pasal Kunci.....	78
C. Disiplin Fraksi & Perilaku Voting: Seni Kepatuhan dan Pembangunan.....	79
D. Politik Anggaran (Budget Politics): Pertarungan Alokasi Sumber Daya Negara.....	80

E. Oversight & Akuntabilitas: Mengawasi Jalannya Pemerintahan	82
F. Keterbukaan Parlemen & Partisipasi: Menuju Legislasi yang Inklusif.....	83
G. Evaluasi Kualitas Produk Hukum: Mengukur Dampak Pasca-Pengesahan	84
Bagian 9 — Eksekutif, Birokrasi, & Implementasi Kebijakan	86
A. Penunjukan Menteri/Pejabat & Ministerial Drift: Antara Profesionalisme dan Politik.....	86
B. Relasi Partai-Birokrasi: Merit vs. Spoils System di Persimpangan Jalan.....	87
C. Kapasitas Kebijakan (Policy Capacity): Mengukur Kemampuan Negara untuk Bertindak.....	88
D. Koordinasi Lintas Kementerian/Level: Menyatukan Langkah dalam Pemerintahan yang Terfragmentasi	90
E. Street-Level Bureaucracy & Variasi Implementasi: Kebijakan di Garis Depan	91
F. Desain Kelembagaan yang Implementable: Merancang Kebijakan yang Realistis.....	92
G. Monitoring, Evaluasi, dan Perbaikan Berkelanjutan: Belajar dari Pengalaman	93
Bagian 10 — Pusat-Daerah: Otonomi, Patronase, dan Inovasi	95
A. Arsitektur Desentralisasi & Multi-Level Governance	96
B. Mesin Partai Lokal & Patron-Clientelism	98
C. Pilkada & Keterhubungan Agenda Pusat-Daerah	100
D. Laboratorium Kebijakan Daerah.....	102
E. Harmonisasi Regulasi & Konflik Kewenangan	104
F. Studi: Kinerja Layanan Publik Prioritas.....	106

G. Mekanisme Akuntabilitas Lokal	108
Bagian 11 — Jaringan Kepentingan: Lobi, Ormas, Bisnis, & Etika	111
A. Pemetaan Pemangku Kepentingan.....	111
B. Mekanisme Lobi & Konsultasi Kebijakan	114
C. Konflik Kepentingan & Korupsi Politik.....	116
D. Partisipasi Publik yang Inklusif	118
E. Transparansi Data & Jejak Kebijakan	120
F. ESG, Ekonomi Politik, dan Kebijakan Sektor	122
G. Studi Mini Kontroversial	124
Bagian 12 — Menilai Dampak & Agenda Reformasi Partai	126
A. Kerangka Evaluasi Pengaruh Parpol.....	126
B. Cara Menilai Dampak.....	128
C. Bukti Lintas Sektor	130
D. Reformasi Pendanaan & Transparansi	132
E. Demokrasi Internal & Rekrutmen Berbasis Merit.....	134
F. Inklusivitas & Representasi Substantif	136
G. Masa Depan Perantara Politik	137
H. Roadmap Kebijakan & Rekomendasi Implementasi.....	139
Penutup	142
Daftar Pustaka	144
Profil Penulis	146

Bagian 1 — Membongkar “Kotak Hitam” Partai dan Kebijakan

“Kesulitan terbesar bukan melahirkan gagasan baru, melainkan melepaskan diri dari gagasan lama.” — **John Maynard Keynes**

A. Mengapa Persoalan Ini Penting

Partai politik merupakan institusi yang tak terhindarkan dalam arsitektur demokrasi perwakilan modern. Dalam sistem politik yang kompleks, partai politik memegang peran sentral sebagai pilar demokrasi, menjalankan fungsi esensial sebagai jembatan penghubung antara warga negara dengan struktur pemerintahan. Mereka adalah mekanisme utama yang memungkinkan aspirasi dan kepentingan masyarakat yang beragam untuk diartikulasikan, dan diperjuangkan dalam arena pembuatan kebijakan. Lebih dari itu, partai politik adalah wadah utama bagi rekrutmen kepemimpinan politik, seleksi calon pejabat publik, dan kanalisasi partisipasi politik warga negara secara terorganisir. Secara teoretis, tanpa kehadiran partai politik yang berfungsi, proses demokrasi perwakilan akan terganggu, dan proses legislasi menjadi kurang representatif.

Meskipun perannya sangat fundamental, realitas partai politik di banyak negara, tidak terkecuali di Indonesia, menampilkan sebuah gambaran yang problematis. Terdapat

Bagian 2 — Evolusi Partai & Orientasi Kebijakan

“Rencana hanyalah niat baik sampai ia berubah menjadi kerja nyata.” — **Peter F. Drucker**

A. Tipologi Partai dari Masa ke Masa

Untuk memahami bagaimana partai politik memengaruhi kebijakan, kita harus terlebih dahulu memahami partai itu sendiri sebagai sebuah organisasi yang dinamis. Bentuk, struktur, dan strategi partai telah berevolusi secara dramatis seiring dengan perubahan masyarakat, teknologi, dan tatanan politik. Analisis tipologis memungkinkan kita untuk mengkategorikan berbagai model partai yang pernah ada dan memahami bagaimana setiap model memiliki logika operasional dan orientasi kebijakan yang berbeda.

Partai Kader (*Cadre Party*)

Model partai paling awal, yang muncul di Eropa pada abad ke-19, adalah partai kader. Partai ini lahir dari dalam parlemen (*intra-parliamentary*), dibentuk oleh sekelompok elite politik yang sudah duduk di badan legislatif dan membutuhkan wahana untuk mengoordinasikan aksi dan memobilisasi dukungan elektoral yang terbatas. Karakteristik utamanya adalah eksklusivitas; partai ini tidak berupaya merekrut anggota sebanyak-banyaknya, melainkan berfokus

Bagian 3 — Sistem Kepartaian & Dampaknya pada Kebijakan

“Kematangan politik diukur dari kesediaan menimbang kepentingan umum di atas kepentingan golongan.”

Sutan Sjahrir

Setelah pada bab sebelumnya kita membedah partai politik sebagai unit analisis individual, pada bab ini kita akan memperluas lensa untuk melihat bagaimana partai-partai tersebut berinteraksi dalam sebuah sistem. Partai tidak beroperasi dalam ruang hampa; mereka berkompetisi dan bekerja sama dalam sebuah "arena" yang aturan mainnya ditentukan oleh sistem kepartaian. Bab ini akan mendemonstrasikan bagaimana arsitektur sistem terutama yang dibentuk oleh aturan pemilu secara sistematis menciptakan insentif dan batasan yang membentuk perilaku partai, yang pada gilirannya sangat menentukan stabilitas, koherensi, dan kualitas kebijakan publik yang dihasilkan.

A. Aturan Pemilu dan Arsitektur Sistem

Sistem pemilihan umum seringkali dianggap sebagai aspek teknis dalam penyelenggaraan demokrasi. Namun, pada kenyataannya, ia adalah instrumen rekayasa politik yang paling fundamental dan kuat. Sistem pemilu adalah

Bagian 4 — “Dapur” Internal Partai: Organisasi & Produksi Kebijakan

“Demokrasi tak cukup nama; ia hidup jika organisasi politik bekerja untuk kemaslahatan rakyat.”

Mohammad Hatta

Untuk memahami bagaimana partai politik membentuk kebijakan publik, kita harus terlebih dahulu memasuki ruang mesin internalnya sebuah “dapur” organisasi tempat ide-ide mentah diolah, agenda dirumuskan, dan para calon pemimpin dipersiapkan. Kualitas produk kebijakan yang dihasilkan sebuah partai sangat bergantung pada kesehatan dapurnya: sejauh mana proses di dalamnya demokratis, berbasis kompetensi, dan akuntabel. Bab ini akan membedah anatomi internal partai politik, menganalisis bagaimana struktur, mekanisme, dan budaya organisasi secara kolektif membentuk kapasitas partai dalam memproduksi kebijakan publik yang berkualitas bagi masyarakat.

A. Demokrasi Internal & Akuntabilitas

Secara normatif, partai politik adalah pilar demokrasi yang diwajibkan oleh kerangka hukum untuk menjalankan mekanisme internal yang demokratis dan akuntabel. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik secara

Bagian 5 — Agenda Setting: Dari Janji Kampanye ke Prioritas Negara

“Etika tanggung jawab menilai politik dari akibat nyata, bukan niat semata.” - **Max Weber**

Bagaimana sebuah isu yang semula hanya menjadi perbincangan di ruang publik atau sekadar janji manis dalam kampanye dapat bertransformasi menjadi prioritas dalam agenda kebijakan negara? Proses ini, yang dikenal sebagai *agenda setting*, bukanlah sebuah alur yang lurus dan teknokratis. Ia adalah sebuah arena pertarungan gagasan dan kepentingan yang kompleks, di mana momentum politik, aktor-aktor kunci, dan cara sebuah isu dibingkai menjadi faktor penentu. Bab ini akan mengkaji dinamika tersebut, menelusuri perjalanan sebuah isu dari wacana menjadi aksi kebijakan pemerintah.

A. Jendela Kebijakan & Entrepreneur Kebijakan

Seorang ilmuwan politik bernama John W. Kingdon mengembangkan sebuah kerangka berpikir yang sangat berguna untuk memahami proses *agenda setting*, yang dikenal sebagai Model Aliran Ganda (*Multiple Streams Framework*). Menurut Kingdon, sebuah isu dapat masuk ke dalam agenda kebijakan pemerintah ketika tiga aliran yang biasanya berjalan

Bagian 6 — Politik Elektoral: Uang, Media, dan Kampanye Digital

“Kejujuran adalah aturan pertama, bukan opsi terakhir.”

Hoegeng

Pemilihan umum adalah puncak dari proses demokrasi, di mana rakyat memberikan mandat kepada para wakilnya. Namun, di balik panggung debat visi-misi dan program, bekerja sebuah mesin politik yang kompleks dan berbiaya tinggi. Mesin ini digerakkan oleh tiga sumber daya utama: uang untuk membiayai operasi, media untuk membentuk opini, dan teknologi digital untuk menjangkau pemilih secara presisi. Bab ini akan mengupas cara kerja mesin elektoral tersebut dan menganalisis bagaimana strategi yang dirancang untuk memenangkan suara pada akhirnya turut membentuk, bahkan mendistorsi, substansi kebijakan yang ditawarkan kepada publik.

A. Pendanaan Politik & Insentif Kebijakan

Operasional partai politik dan kampanye pemilihan umum membutuhkan biaya yang sangat besar. Sumber pendanaan partai politik secara legal berasal dari tiga sumber utama: iuran anggota, bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD), dan

Bagian 7 — Koalisi Kekuasaan & Negosiasi Kebijakan: Arsitektur Pengaruh

“Keputusan berani lahir dari tujuan yang terang.”

Ali Sadikin

Dalam sistem pemerintahan presidensial multipartai seperti di Indonesia, koalisi politik bukan sekadar pilihan, melainkan sebuah keniscayaan. Tanpa adanya satu partai pun yang mampu meraih mayoritas absolut di parlemen, pembentukan aliansi menjadi fondasi utama bagi setiap pemerintahan untuk dapat menjalankan agenda kebijakannya secara efektif. Bab ini akan membedah anatomi koalisi politik di Indonesia, melampaui sekadar kalkulasi jumlah kursi di lembaga legislatif. Analisis akan mendalami logika strategis, mekanisme internal, serta dinamika negosiasi yang kompleks yang pada akhirnya menentukan arah dan substansi kebijakan publik yang dihasilkan.

A. Arsitektur Koalisi dan Pembagian Portofolio: Kalkulus Antara Stabilitas dan Inklusivitas

Secara teoretis, arsitektur koalisi pemerintahan dapat dibedakan menjadi dua model utama: koalisi *minimal winning* dan koalisi *oversized* (gemuk). Koalisi *minimal winning*

Bagian 8 — Legislasi & Anggaran: Arena Penentu

“Kekuasaan perlu saling mengimbangi agar kebijakan berpihak pada warga.”

James Madison

Setelah memahami arsitektur dan dinamika internal koalisi, fokus analisis beralih ke arena di mana pengaruh politik tersebut diwujudkan secara konkret: proses pembentukan undang-undang (legislasi) dan alokasi anggaran negara. Di sinilah agenda-agenda kebijakan yang diperjuangkan oleh partai politik diuji, dinegosiasikan secara intens, dan akhirnya dilembagakan menjadi produk hukum serta program pemerintah yang mengikat dan berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.

A. Siklus Legislasi dari A-Z: Anatomi Formal Pembentukan Undang-Undang

Proses pembentukan undang-undang di Indonesia mengikuti sebuah siklus yang terstruktur dan sistematis, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Secara garis besar, siklus ini terdiri dari beberapa tahapan utama:

Bagian 9 — Eksekutif, Birokrasi, & Implementasi Kebijakan

“Kebijakan baik diuji di lapangan, bukan di atas kertas.”

Boediono

Setelah sebuah kebijakan berhasil dirumuskan dan dilembagakan melalui proses legislasi dan penganggaran, tantangan berikutnya yang tidak kalah berat adalah tahap implementasi. Di fase inilah cetak biru kebijakan yang telah disepakati di arena politik diuji di dunia nyata. Keberhasilan atau kegagalan sebuah kebijakan sering kali ditentukan oleh interaksi yang kompleks antara pimpinan eksekutif, mesin birokrasi, dan pengaruh partai politik yang terus berlanjut hingga ke tingkat pelaksana di lapangan.

A. Penunjukan Menteri/Pejabat & Ministerial Drift: Antara Profesionalisme dan Politik

Dalam sistem pemerintahan koalisi, komposisi kabinet merupakan cerminan dari arsitektur kekuasaan yang menopang presiden. Penunjukan menteri dan pejabat setingkat menteri menjadi alat utama untuk mengakomodasi kepentingan partai-partai politik pendukung. Proses ini melahirkan dilema klasik antara memilih figur profesional atau teknokrat yang memiliki kompetensi teknis di bidangnya,

Bagian 10 — Pusat–Daerah: Otonomi, Patronase, dan Inovasi

“Desentralisasi bermakna jika manusia di daerah bertumbuh.”

B.J. Habibie

Relasi antara pemerintah pusat dan daerah merupakan arena fundamental di mana pengaruh partai politik terhadap kebijakan publik terwujud secara nyata. Sejak era Reformasi, Indonesia telah mengadopsi kerangka desentralisasi yang kompleks, memberikan otonomi luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Namun, arsitektur formal ini berinteraksi dengan realitas politik informal yang diwarnai oleh jaringan patronase dan klientelisme. Bab ini akan mengupas tuntas dinamika hubungan pusat-daerah, mulai dari desain kelembagaan dan fiskal, cara kerja mesin politik lokal, hingga munculnya inovasi kebijakan sebagai produk positif dari otonomi. Analisis ini akan menyoroti bagaimana partai politik beroperasi dalam tegangan antara agenda nasional, kepentingan lokal, dan tuntutan akuntabilitas publik.

Bagian 11 — Jaringan Kepentingan: Lobi, Ormas, Bisnis, & Etika

“Kekuasaan tanpa nurani melahirkan kebijakan tanpa arah.” **Ahmad Syafii Maarif**

Proses perumusan kebijakan publik bukanlah sebuah ruang hampa yang diisi hanya oleh partai politik dan lembaga negara. Ia adalah sebuah arena yang ramai, dipenuhi oleh berbagai aktor non-pemerintah yang secara aktif berusaha mempengaruhi arah dan isi kebijakan demi kepentingan mereka. Jaringan kepentingan ini, yang mencakup kelompok bisnis, organisasi masyarakat sipil (ormas), serikat pekerja, hingga akademisi, menggunakan berbagai strategi, mulai dari lobi di balik layar hingga konsultasi publik yang terbuka. Bab ini akan memetakan para pemangku kepentingan utama, menganalisis mekanisme pengaruh mereka, serta mengupas isu-isu etika krusial seperti konflik kepentingan dan korupsi politik yang seringkali menyertai interaksi antara kekuasaan politik dan kepentingan privat.

A. Pemetaan Pemangku Kepentingan

Langkah fundamental untuk memahami dinamika pengaruh dalam kebijakan publik adalah dengan melakukan pemetaan pemangku kepentingan (*stakeholder mapping*). Pemangku kepentingan atau *stakeholder* adalah setiap

Bagian 12 — Menilai Dampak & Agenda Reformasi Partai

“Data yang jujur adalah dasar koreksi yang berani.”
Emil Salim

Setelah menganalisis bagaimana partai politik mempengaruhi kebijakan dari berbagai sisi, bab terakhir ini akan fokus pada dua hal krusial: bagaimana cara kita menilai dampak nyata dari pengaruh tersebut, dan apa agenda reformasi yang perlu didorong untuk memperkuat peran positif partai politik di masa depan. Penilaian dampak yang objektif dan agenda reformasi yang terstruktur adalah kunci untuk mendorong partai politik agar lebih akuntabel, demokratis, dan responsif terhadap kebutuhan publik. Bab ini akan menyajikan kerangka evaluasi yang sistematis, metode penilaian yang kredibel, serta peta jalan reformasi yang konkret dan dapat diimplementasikan.

A. Kerangka Evaluasi Pengaruh Parpol

Untuk menilai pengaruh partai politik terhadap kebijakan publik secara objektif, diperlukan sebuah kerangka evaluasi yang sistematis. Evaluasi adalah tahapan krusial dalam siklus kebijakan yang bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan atau kegagalan, efektivitas, serta efisiensi

Penutup

Buku ini lahir dari dorongan untuk menjembatani jarak antara janji-janji normatif demokrasi dan praktik politik yang kerap berliku. Melalui lensa Lembaga-Aktor-Ide-Konteks dan pemetaan siklus kebijakan—dari agenda setting, perumusan, pengambilan keputusan, implementasi, hingga evaluasi—saya berupaya menunjukkan bahwa pengaruh partai politik terhadap kebijakan publik bukanlah satu garis lurus, melainkan jaringan proses yang saling bertaut. Di dalamnya, aturan formal bertemu dengan praktik informal; koalisi kuasa bernegosiasi dengan opini publik; gagasan bertarung dengan kepentingan; dan kapasitas birokrasi menentukan nasib keputusan yang telah disahkan.

Sejumlah pelajaran kunci dapat ditarik. Pertama, kualitas kebijakan publik sangat ditentukan oleh kualitas demokrasi internal partai—cara partai merekrut, mengader, dan mempromosikan kepemimpinan menentukan mutu argumen dan integritas keputusan. Kedua, arsitektur sistem kepartaian, desain pemilu, dan tata kelola pendanaan politik membentuk insentif yang mendorong atau justru menghambat orientasi kebijakan jangka panjang. Ketiga, koalisi pemerintahan dan konfigurasi parlemen menegaskan bahwa kebijakan adalah hasil negosiasi multipihak, sehingga transparansi proses dan akuntabilitas menjadi syarat minimal bagi legitimasi. Keempat, implementasi kebijakan adalah “ujian realitas” yang menuntut kapasitas administratif, koordinasi pusat-daerah, dan mekanisme evaluasi berbasis data agar putusan tidak berhenti sebagai teks.

Dari temuan-temuan tersebut, agenda perbaikan yang paling mendesak mencakup: penguatan demokrasi internal dan meritokrasi kader; penataan ulang skema pendanaan publik yang

Daftar Pustaka

- Badan Keahlian DPR RI. (2019). *Kebijakan berbasis bukti (Evidence-Based Policy) untuk legislasi DPR RI dan daya saing bangsa*.
- Faisal, F., Barid, B., & Mulyanto, D. (2018). Pendanaan partai politik di Indonesia: Mencari pola pendanaan ideal untuk mencegah korupsi. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 4(1), 265–287.
- Indikator Politik Indonesia. (2024, 18 Januari). *Dinamika elektoral di tingkat nasional dan 13 provinsi kunci*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2020). Pencegahan korupsi politik: Penerapan Sistem Integritas Partai Politik di Partai Kebangkitan Bangsa. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 6(2).
- Komisi Pemilihan Umum. (2024). *Kebijakan dana kampanye Pemilu Serentak 2024*.
- Majalah Hukum Nasional (BPHN). (2024). *Volume 54, No. 2 (Edisi tematik reformasi partai politik)*.
- Navasari, S. (2022). Mekanisme penyelesaian konflik internal di Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan Kota Batu. *Moderatio: Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik*, 2(2),
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilu. (2023). *Berita Negara Tahun 2023 No. 696*.
- Romli, L. (2011). Reformasi partai politik dan sistem kepartaian di Indonesia. *Jurnal Politica*, 2(2), 199–220.
- Romli, L. (2017). Koalisi dan konflik internal partai politik pada era reformasi. *Jurnal Politica*, 8(2), 95–115.

Profil Penulis



Dr. Carlos Manuel Maia, AKS., M.Si., lahir di Dili pada 4 November 1974, sebagai putra dari Manuel Maia (+) dan Fernanda Maia (+). Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga yang menanamkan nilai disiplin, tanggung jawab, dan pengabdian. Ia menikah dengan Romana Christiana Boy dan dikaruniai dua orang anak, Dirgatama Manuel Maia dan Maria Fernanda Maia, yang menjadi sumber inspirasi dalam perjalanan hidup dan pengabdianya.

Pendidikan dasarnya ditempuh di SD Negeri 9 Dili dan diselesaikan pada tahun 1988. Ia melanjutkan ke SMP Katolik Paulus VI Dili hingga lulus pada tahun 1991, kemudian menyelesaikan pendidikan menengah atas di SMA Negeri 2 Dili pada tahun 1994. Sejak masa sekolah, bakat kepemimpinan dan ketekunannya telah tampak melalui berbagai aktivitas organisasi dan kepemudaan yang diikutinya.

Minatnya pada bidang sosial membawanya melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial Bandung, Jurusan Ilmu Pekerjaan Sosial, dan meraih gelar Ahli Kesejahteraan Sosial (AKS) pada tahun 1998. Ia kemudian memperdalam kajian sosiologi dengan menempuh Program Magister Sosiologi di Universitas Muhammadiyah Malang dan memperoleh gelar Magister Sains

(M.Si.) pada tahun 2004. Puncak capaian akademiknya diraih pada tahun 2020 dengan gelar Doktor (Dr.) dalam bidang Ilmu Administrasi dari Universitas Nusa Cendana Kupang. Latar belakang akademik ini membentuk fondasi kuat bagi pemikirannya dalam bidang administrasi publik, kebijakan, dan pembangunan sosial.

Sejak usia muda, Dr. Carlos aktif dalam berbagai organisasi. Ia terlibat dalam Gerakan Pramuka dari jenjang Siaga hingga Penegak Saka Dirgantara di Dili (1984–1999). Kepemimpinannya terasah ketika menjabat sebagai Ketua OSIS SMP Katolik Paulus VI (1989–1991) serta menjadi anggota dan pengurus OSIS SMA Negeri 2 Dili (1992–1993). Ia juga aktif dalam dunia bela diri melalui Perguruan Pencak Silat Padjadjaran (1991–1994) dan kemudian Tarung Derajat sejak 1994 hingga kini. Pengalaman ini memperkaya karakter kepemimpinan, ketegasan, serta daya juangnya.

Berbagai capaian penting turut mewarnai perjalanan organisasinya. Pada tahun 1991, ia menjadi peserta Jambore Nasional di Cibubur, Jakarta, sebagai Pratama Kontingen Timor Timur. Tahun 1993, ia terpilih sebagai Paskibraka Nasional dan dipercaya menjabat Lurah Putera Desa Bahagia serta Komandan Kelompok 17 Pagi di Istana Negara, Jakarta. Dalam bidang olahraga bela diri, ia pernah menjadi pelatih Tarung Derajat untuk Kontingen Timor Leste pada SEA Games XXVI tahun 2011 di Jakarta–Palembang, serta pelatih Kontingen Nusa Tenggara Timur pada Kejuaraan Nasional Piala Presiden IV tahun 2013 di Bandung. Keseluruhan pengalaman ini mencerminkan integritas, dedikasi, dan konsistensi dalam pengabdian.

Dalam ranah profesional, Dr. Carlos mengabdikan diri sebagai dosen tidak tetap sejak tahun 1999 di berbagai perguruan tinggi negeri dan swasta di Kupang dan Malang. Selain itu, sejak tahun 2007 ia juga menekuni dunia kewirausahaan, khususnya di sektor

pariwisata dan perdagangan, sebagai wujud kemandirian dan kontribusi nyata terhadap pengembangan ekonomi.

Sebagai akademisi produktif, ia telah menghasilkan berbagai karya ilmiah yang membahas pendidikan, administrasi publik, kebijakan, demokrasi, pembangunan daerah, hingga tata kelola pemerintahan dan korporasi di era digital. Karya-karyanya merefleksikan konsistensi pemikiran yang kritis dan konstruktif terhadap dinamika perubahan sosial-politik kontemporer. Melalui buku-bukunya, ia mendorong inovasi pelayanan publik, penguatan tata kelola pemerintahan, pemberdayaan masyarakat marjinal, serta pembangunan yang berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan.

Perjalanan akademik, pengalaman organisasi, serta kiprah profesional yang luas menjadikan Dr. Carlos Manuel Maia sebagai figur akademisi-praktisi yang utuh. Ia tidak hanya bergiat dalam ranah konseptual, tetapi juga terlibat langsung dalam implementasi kebijakan dan pemberdayaan masyarakat. Dedikasinya terhadap pendidikan, administrasi publik, dan kesejahteraan sosial menghadirkan teladan tentang bagaimana ilmu pengetahuan dapat bersinergi dengan tindakan nyata demi kemajuan masyarakat.

Buku ini membahas bagaimana partai politik memengaruhi kebijakan publik, mulai dari janji kampanye, koalisi kekuasaan, legislasi, anggaran, hingga tarik-menarik kepentingan elite. Dengan bahasa yang jernih, pembaca diajak memahami bahwa kebijakan negara lahir dari pertarungan gagasan, kekuasaan, dan kepentingan yang kompleks.

Melalui pembahasan yang relevan dengan demokrasi Indonesia, buku ini membantu pembaca menilai partai politik secara lebih kritis dan rasional. Karya ini cocok bagi siapa pun yang ingin memahami politik tidak hanya dari slogan, tetapi dari cara kerja dan dampaknya bagi masyarakat.



PENERBIT INDONESIA IMAJI

Anggota IKAPI No. 292/JTI/2021

@indonesiaimaji
indonesiaimaji.com

